

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH**
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Heru Budi Sulistyو

NIM: 00 2114 134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2005**

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA
OTONOMI DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh :

Heru Budi Sulistyó

NIM : 60 2114 134

Telah disetujui oleh :

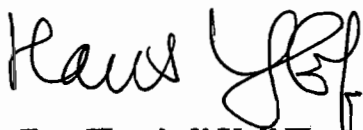
Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal : 3 Oktober 2005

Pembimbing II



Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.

Tanggal : 18 November 2005

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI
DAERAH**

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Nama : Heru Budi Sulistyo

NIM : 00 2114 134

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 8 Desember 2005

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	: Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.
Anggota	: Dionysius Desembriarto, S.E., M.Si.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the panel members]

Yogyakarta, 23 Desember 2005

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



[Handwritten signature of Dekan]
Dr. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengetahuan semata.

Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan membuat jalanmu lurus"

(Ams 3: 5-6)

*"Kedermawanan bukanlah memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan dari padamu,
tetapi memberikan kepada saya apa yang lebih engkau butuhkan dari pada yang saya perlukan"*

(Kahlil Gibran)

*"Jangan pernah engkau lari dari segala rintangan, karena dengan rintangan yang engkau hadapi
itulah engkau akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya".*

(Heru)

***Demi dharma hidupku kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, hanya
dengan bimbingan-Mu hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan
dalam rengkuhan kasih-Mu ingin kupersembahkan bersama dengan
sembah sujudku untuk Ibuku dan Alm. Bapakku tercinta serta
Kakakku tersayang semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya
untuk kita semua.***

Baktiku untuk Almamater tercinta.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 8 Desember 2005

Penulis



(Heru Budi Sulistyono)

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Heru Budi Sulisty

002114134

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2005

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan selama otonomi daerah, 2) Untuk membandingkan tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan selama otonomi daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas penerimaan PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari penerimaan PAD berkisar dari 101,996% sampai dengan 123,210%. 2) Pada tahun anggaran 1998/1999 kinerja Pemerintah Daerah yang paling efektif terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tahun anggaran 1999/2000 terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bantul, tahun 2002 terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan tahun 2003 terdapat pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

ABSTRACT

Comparison Analysis of Effectiveness on Pendapatan Asli Daerah (PAD) Before and During The Regional Autonomy

A Case Study at Regency/Municipal Government in the Special Region of Yogyakarta

Heru Budi Sulistyo

002114134

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2005

This research aimed (1) to know the effectiveness rate of financial performance of the Regency/Municipal Governments in the Special Region of Yogyakarta before and during the regional autonomy, (2) to compare the effectiveness rate of financial performance of among the Regency/Municipal Governments.

Data obtaining techniques used were documentation and interview, and the data analysis techniques used were quantitative data analysis technique. The quantitative data analysis was used to calculate the level of effectiveness revenues of PAD.

The result of this research showed that (1) The rates of financial effectiveness performance were between from 101,996% and 123,210%. (2) In the fiscal year of 1998/1999, and 2002 the most effective performance was achieved by Regency Government of Kulon Progo. In the fiscal year of 1999/2000 it was achieved by the Regency Government of Bantul, and in 2003 it was achieved by the Municipal Government of Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya dari awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah” Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kuntoro Mangunharjo, Akt. yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Bapak Ir. Nanang Suwandi, MMA sebagai kepala BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
7. Ibu Dra. Hj. Sri Subekti Handayani sebagai kepala BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Sleman beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
8. Bapak Drs. Sudjono sebagai kepala BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Bantul beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
9. Ibu Dra. Wadjarni PR. sebagai kepala BAPPEDA Pemerintah Kota Yogyakarta beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
10. Bapak R, Khryсна Hariatmo, SH sebagai kepala BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
11. Bapak Ir. Djunianto Marsudi Utomo sebagai kepala BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kulon Progo beserta stafnya yang telah menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian.
12. Bapakku di alam kelanggengan yang telah memberiku semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini walau hanya lewat mimpi-mimpi indahku. Ibuku dan Kakakku yang telah memberikan semangat, kasih sayang, arahan, doa dan

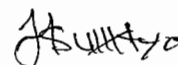
perhatian yang sangat besar bagi penulis. Terima kasih atas segala kesabaran dan pengertiannya.

13. Buat *Gembel Elite Community* : Simbah, Wulan, Pak Dhe, Waldi, Bayu Black, Ceper, *Walaupun kita seorang Gembel tapi Gembel yang Elite Ok.....*
14. Buat saudaraku : Agus, Indra & Mas Nanang, makasih pinjaman komputer dan buku-bukunya.
15. Untuk semua teman-teman baikku :Yusup, Antok, Igo, Agung, Alm. Gimbal, Karjo J R, Wawan, Ratno, Warno, Anggun, serta teman-teman seperjuangan "Akuntansi angkatan 2000" kalian memang sahabat-sahabat terbaik yang pernah aku punya dan aku berharap semoga kita semua dapat menjadi segelintir orang yang berguna dalam kehidupan ini.
16. Lek Slamet & Eyang Suta Soma, "*Segayuhan Bisane Koleksanan Yen Dibarengi Kanthi Laku.....Lan Nyenyunin Marang Gusti Kang Maha Agung*".
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, terima kasih atas semua dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 8 Desember 2005

Penulis



Heru Budi Sulistyono



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Otonomi Daerah	6
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	6

2. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah	7
B. Kinerja	
1. Pengertian Kinerja.....	8
2. Evaluasi Kinerja	10
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...	11
2. Struktur APBD	12
3. Proses Penetapan APBD	15
4. Pelaksanaan APBD	
a. Penerimaan dan Pengeluaran APBD	16
b. Pengelolaan Barang Daerah	19
c. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
5. Perhitungan APBD	20
6. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.....	20

BAB III METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	22
C. Tempat dan Waktu Penelitian	23
D. Data Yang Diperlukan.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. KABUPATEN SLEMAN

1. Keadaan Geografi.....	26
2. Keadaan Penduduk.....	27
3. Sosial	
a. Pendidikan.....	27
b. Agama.....	27
4. Industri.....	28
5. Keuangan dan Perbankan.....	28

B. KABUPATEN BANTUL

1. Keadaan Geografi.....	29
2. Keadaan Penduduk.....	29
3. Sosial	
a. Pendidikan.....	29
b. Agama.....	30
4. Industri.....	30
5. Keuangan dan Perbankan.....	30

C. KABUPATEN KULON PROGO

1. Keadaan Geografi.....	31
2. Keadaan Penduduk.....	31
3. Sosial	
a. Pendidikan.....	31

b. Agama	32
4. Industri.....	32
5. Keuangan dan Harga	32
D. KABUPATEN GUNUNG KIDUL	
1. Keadaan Geografi.....	33
2. Keadaan Penduduk.....	34
3. Sosial	
a. Pendidikan	34
b. Agama	34
4. Industri.....	35
5. Keuangan.....	35
E. KOTA YOGYAKARTA	
1. Keadaan Geografi.....	35
2. Keadaan Penduduk.....	36
3. Sosial	
a. Pendidikan	36
b. Agama	36
4. Industri.....	37
5. Keuangan dan Perbankan	37
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Rasio Efektivitas	39
B. Perbandingan Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.....	51

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Keterbatasan Penelitian.....	55
C. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Struktur APBD Dengan Pendekatan Kinerja Propinsi/ Kabupaten/ Kota.....	13
Tabel V. 1	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Sleman	40
Tabel V. 2	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Bantul.....	42
Tabel V. 3	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Kulon Progo..	45
Tabel V. 4	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Gunung Kidul.....	47
Tabel V. 5	Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kota Yogyakarta	49
Tabel V.6	Perbandingan Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun	
	Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003	60
Lampiran 2	Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun	
	Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003	62
Lampiran 3	Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun	
	Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003	64
Lampiran 4	Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul	
	Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003	66
Lampiran 5	Data Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun	
	Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003	68
Lampiran 6	Surat Keterangan Izin Penelitian.....	70

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Reformasi tersebut timbul karena pada masa orde baru pemerintahan bersifat sentralistik serta penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, sehingga tuntutan agar pemerintah melaksanakan desentralisasi sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten dan Kota.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Seperti yang tercantum dalam pasal 18 UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bratakusumah dan Solihin, 2002:2)

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang intinya adalah kewenangan yang besar dari pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Selain itu juga dikeluarkan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No.25 tahun 1999 ini menggantikan UU No.32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Di dalam pasal 8 PP No. 105 tahun 2000 disebutkan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang berarti bahwa suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan biaya atau input yang ditetapkan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2001 yang berarti telah terjadi perubahan sistem pemerintahan yang bermula bersifat sentralistik menjadi desentralistik sehingga menyebabkan bertambahnya kewenangan daerah sebagai akibat dari pelimpahan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah pusat yang kemudian dialihkan kepada daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah ditinjau dari tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan ditinjau dari tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah tersebut ?

C. Batasan Masalah

1. Peneliti hanya membatasi subyek penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Anggaran yang dijadikan obyek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan PAD Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999 dan tahun anggaran 1999/2000, selama otonomi daerah tahun 2002, dan tahun 2003.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan selama Otonomi Daerah.
2. Untuk membandingkan tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan selama Otonomi Daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Universitas, dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.
3. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan di bahas mengenai salah satu unsur dari reformasi total yaitu pemberian otonomi yang luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan masalah yang akan diteliti, membuat batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori yang dipakai dalam melakukan penelitian. Pembahasan tersebut berupa uraian mengenai otonomi daerah, kinerja, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bab III : Metoda Penelitian

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yaitu studi kasus yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa

Yogyakarta. Pembahasan selanjutnya yaitu subjek dan obyek penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV: Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada bab ini membahas mengenai sejarah berdirinya Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, luas wilayah, dan keadaan penduduk.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas.

Bab VI : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang digunakan. Selain itu juga berisi tentang keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002:46) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut (Bratakusumah dan Solihin, 2002:4-5) :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan otonomi daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

- g. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- h. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai daerah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
- i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari pemerintah dan kepala daerah desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

B. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja (*performance/prestasi kerja*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi (Bastian, 2001:329-330).

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud (Mardiasmo, 2002:121) :

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan publik.
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah salah satu alat ukurnya adalah anggaran daerah, yaitu anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Jadi anggaran dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan yang direncanakan dalam resentra (rencana strategis) dalam satu periode tertentu.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja tidak akan memberikan hasil optimal apabila dilakukan dengan cara atau metode yang tidak tepat. Cara-cara evaluasi kinerja menurut Bastian (2001:344) adalah dengan membandingkan antara:

- a. Tingkat kinerja yang diidentifikasi sebagai tujuan dengan tingkat kinerja yang nyata.
- b. Proses yang dilakukan dengan organisasi lain yang terbaik dibidangnya (*benchmarking*).
- c. Realisasi dan target yang dibebankan dari instansi yang lebih tinggi.
- d. Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi periode yang sama tahun lalu.
- e. Rencana evaluasi lima tahun dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.

Evaluasi kinerja ini dapat berhasil jika didukung oleh sistem informasi (pola pengumpulan data) yang baik sehingga menghasilkan data yang tepat, lengkap, dan tepat waktu. Sistem informasi bagi pengumpulan data kinerja yang ideal tersebut harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan dan manfaat nyata yang dapat diperoleh.

Keberhasilan ataupun kegagalan manajemen publik dapat di ukur dengan melakukan (Triyono, 2002) :

- a. Perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Perbandingan antara kinerja nyata tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- c. Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja pemerintah daerah lain.

- d. Perbandingan capaian tahun berjalan dengan rencana lima tahunan.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah, (1995:20) adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Definisi tersebut mengandung unsur sebagai berikut (Mamesah, 1995:20-21):

- a. Rencana operasional daerah yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di mana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.

- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Dituangkan dalam bentuk angka jenis kegiatan dan jenis proyek
- d. Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya.

2. Struktur APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaan (Bratakusumah dan Solihin, 2002:212).

Dalam struktur APBD yang baru sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dan pinjaman (utang) tidak lagi dimasukkan sebagai unsur penerimaan daerah, namun dimasukkan sebagai pembiayaan daerah. Dengan struktur baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit, sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik). Jika terjadi defisit anggaran untuk menutupnya disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah juga dimungkinkan untuk membentuk dana cadangan. Dengan demikian, anggaran tidak harus dihabiskan selama tahun

anggaran bersangkutan, namun dapat ditransfer ke dalam dana cadangan (Mardiasmo, 2002:166)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Struktur anggaran dengan pendekatan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Struktur APBD Dengan Pendekatan Kinerja
Propinsi / Kabupaten / Kota

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
2	Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan dari Propinsi *)		
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
	<i>Jumlah Pendapatan</i>		
II	BELANJA		
1	APARATUR DAERAH		
1	Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Personalia		

Tabel II.1
Struktur APBD Dengan Pendekatan Kinerja
Propinsi / Kabupaten / Kota (Lanjutan)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		
3	Belanja Modal/Pembangunan		
2	PELAYANAN PUBLIK		
1	Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai/Operasional Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		
3	Belanja Modal/Pembangunan		
3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan		
4	Belanja Tidak Tersangka		
	<i>Jumlah Belanja</i>		
	Surplus/Defisit		
III	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan <i>Jumlah Penerimaan Daerah</i>		
2	Pengeluaran Daerah Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sekarang <i>Jumlah Pengeluaran Daerah</i>		

Tabel II.1
Struktur APBD dengan Pendekatan Kinerja
Propinsi / Kabupaten / Kota (Lanjutan)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Jumlah Pembiayaan		

*) Untuk Kabupaten / Kota

Sumber : Mardiasmo (2002:164-165)

3. Proses Penetapan APBD

Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Bila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Penyempurnaan rancangan APBD harus disampaikan kembali kepada DPRD. Apabila rancangan APBD tersebut tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan.
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak yaitu untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga.

Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu (Bratakusumah dan Solihin, 2002:215-216)

4. Pelaksanaan APBD

a. Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Setiap perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.

Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa dan dari penyimpanan dan/atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah. Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Surat Keputusan otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran.

Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar. Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar. Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD. Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberi tambahan penghasilan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit kerja lainnya menjadi beban BUMD atau Unit usaha yang bersangkutan.

Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pengguna anggaran belanja tidak tersangka diberitahukan kepada DPRD (Bratakusumah dan Solihin, 2002:216-217)

b. Pengelolaan Barang Daerah

Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah. Pengelolaan Barang Daerah itu meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah. Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah itu dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah.

Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah/ sekretariat DPRD/ dinas Daerah/ lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan/atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002:218).

c. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku, yaitu pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002:218).

5. Perhitungan APBD

Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dan APBD.

Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dan anggaran penerimaan, maupun selisih antara realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya (Bratakusumah dan Solihin, 2002:219)

6. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan dimaksud memuat kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan. Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lama satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD.
- b. Nota Perhitungan APBD.

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain mencakup :

- a. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- b. Kinerja pelayanan yang dicapai.
- c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/ pembangunan untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik.
- d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD.
- e. Posisi Dana Cadangan.
- f. Laporan Aliran Kas.
- g. Neraca Daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002:221)

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu obyek tertentu dalam waktu tertentu di mana dari data tersebut di analisis dan di tarik kesimpulan.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

- a. BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. BAPPEDA Kabupaten Sleman
- c. BAPPEDA Kabupaten Bantul
- d. BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo
- e. BAPPEDA Kabupaten Gunung Kidul
- f. BAPPEDA Kota Yogyakarta
- g. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
- h. BPS Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Obyek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah data PAD dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum otonomi daerah tahun

anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000, dan selama otonomi daerah tahun 2002, dan tahun 2003.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus tahun 2005.

D. Data yang Diperlukan

1. Sejarah atau gambaran umum Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. APBD dan PAD sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data-data keuangan yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang pertama penulis menggunakan rasio Efektivitas dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Efektivitas :

1. Membuat tabel target dan realisasi penerimaan PAD sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000, dan selama otonomi daerah tahun 2002, dan tahun 2003.
2. Mengidentifikasi target penerimaan PAD dan realisasi PAD untuk masing-masing tahun anggaran.
3. Membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
4. Menentukan tingkat efektivitas.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004:285).

Untuk menjawab permasalahan yang kedua penulis membandingkan tingkat rasio efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat tabel perbandingan tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Membandingkan tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menentukan daerah yang kinerjanya paling efektif.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi dari 30 propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut.
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara.
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat.
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ}.33 - 8^{\circ}.12$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00 - 110^{\circ}.50$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $3.185,80\text{km}^2$ atau $0,17\%$ dari luas Indonesia ($1.890.754\text{ km}^2$), merupakan propinsi terkecil setelah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari :

A. KABUPATEN SLEMAN

1. Keadaan Geografis.

Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai dari $107^{\circ} 15' 03''$ sampai dengan $100^{\circ} 34' 51''$ Bujur Timur, dan mulai dari $7^{\circ} 34' 51''$ sampai dengan $7^{\circ} 47' 03''$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Propinsi

Jawa Tengah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2003, jumlah penduduk Sleman tercatat 884.727 jiwa, terdiri dari 437.967 laki-laki dan 446.760 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km². Kepadatan penduduk 1.539 jiwa per km².

3. Sosial

a. Pendidikan

Pada jenjang SD, tahun 2003 memiliki 503 unit sekolah dengan jumlah murid sebanyak 78.258 anak dan diasuh oleh 4.242 guru. Untuk jenjang SLTP tercatat sebanyak 105 unit sekolah dengan jumlah murid 30.905 anak dan diasuh oleh 2.623 guru. Sedangkan pada jenjang SMU tercatat sebanyak 51 unit sekolah dengan jumlah murid 13.560 anak dan diasuh oleh 1.465 guru.

b. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk pada tahun 2003 tercatat sekitar 878.812 orang beragama Islam, 56.710 orang beragama Katolik, 22.606 orang beragama Kristen, 1.234 orang beragama Hindu, dan 746 orang beragama Budha.

4. Industri

Industri menurut bidangnya dibedakan menjadi dua sektor yaitu Sektor Industri Kecil dan Sektor Industri Besar-Menengah. Pada tahun 2003 perusahaan industri kecil sebanyak 14.764 perusahaan. Sedangkan industri besar-menengah sebanyak 71 perusahaan.

5. Keuangan dan Perbankan.

Realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2003 mencapai 458,88 miliar rupiah. Penerimaan terbesar berasal dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sebesar 50,457 miliar rupiah. Besarnya belanja mencapai 441,51 miliar dengan alokasi belanja pegawai mencapai 281,62 miliar atau 62,93 % dari total belanja Pemerintah Daerah dan untuk pelayanan publik sebesar Rp309.060.518,00.

Realisasi PAD terbesar berasal dari pajak daerah yang besarnya tercatat 24,91 miliar rupiah. Sedangkan penyumbang nominal terbesar berasal dari pajak penerangan jalan yang mencapai 11,83 miliar rupiah. Realisasi PAD terbesar yang berasal dari pos retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan RSUD sebesar 4,88 miliar rupiah.

Berdasarkan data perbankan pada tahun 2003, jumlah penabung tercatat sebanyak 4.600.344 nasabah dengan jumlah tabungan sebesar 4,58 triliun rupiah. Sedangkan besarnya pinjaman yang disalurkan oleh 19 bank dalam wilayah Kabupaten Sleman tercatat 4,17 triliun rupiah untuk 727.513 peminjam.

B. KABUPATEN BANTUL

1. Keadaan Geografi

Posisi Kabupaten Bantul terletak antara $110^{\circ} 12' 34''$ sampai $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 44' 04''$ sampai $8^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

2. Keadaan Penduduk

Bedasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2003, jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 796.863 jiwa yang tersebar di 75 Desa di 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut 390.534 jiwa adalah laki-laki dan 406.329 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah $506,85 \text{ km}^2$ maka kepadatan penduduknya 1.572 jiwa per km^2 .

3. Sosial

a. Pendidikan

Bedasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SD Negeri di Kabupaten Bantul pada tahun 2003 sebanyak 376 buah, SD Swasta 67 buah, SLTP Negeri 48 buah, SLTP Swasta 46 buah, SMU Negeri 19 buah, SMU Swasta 20 buah, SM Kejuruan Negeri 7 buah, dan SM Kejuruan Swasta 19 buah.

b. Agama

Berdasarkan data dari Departemen Agama, jumlah penduduk pemeluk agama Islam sebanyak 759.364 orang, pemeluk agama Katolik 19.150 orang, pemeluk agama Kristen 11.949 orang, pemeluk agama Hindu 663 orang, dan pemeluk agama Budha 237 orang.

4. Industri

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, jumlah industri kecil pada tahun 2003 tercatat sebanyak 17.936 usaha dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 66.253 orang. Sedangkan untuk industri besar/ sedang tercatat 140 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 15.757 orang.

5. Keuangan dan Perbankan

Realisasi Total Penerimaan Daerah pada tahun 2003 Rp436.016,303 juta yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp32.882,358 juta, Dana Perimbangan Rp326.269,037 juta, Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp46.622,317 juta, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp30.242,592 juta. Sedangkan untuk total pengeluaran tahun 2003 tercatat sebesar Rp421.692,042 juta.

Jumlah penabung di beberapa bank cabang Bantul tahun 2003 tercatat 329.120 nasabah dengan jumlah tabungan Rp393.331.571.000,00. Sedangkan jumlah deposan tercatat 6.316 nasabah dengan jumlah nilai tabungan deposito sebesar Rp94.981.255.000,00. Banyaknya nasabah pengambil kredit tercatat 41.464 debitur dengan nilai kredit Rp251.195.041.000,00.

C. KABUPATEN KULON PROGO

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Kulon Progo terletak pada $110^{\circ}1'37''$ sampai dengan $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}38'42''$ sampai dengan $7^{\circ}59'3''$ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100-1.000 meter di atas permukaan laut. Luas Kabupaten Kulon Progo adalah 586,28 km² yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 88 Desa. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk menurut registrasi pertengahan tahun 2003 sebesar 449.811 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 219.918 jiwa dan penduduk perempuan 229.893 jiwa. Kepadatan penduduk sebesar 767 jiwa per km².

3. Sosial

a. Pendidikan

Bedasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah SD Negeri di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2003 sebanyak 311 buah, SD Swasta 61 buah, SLTP Negeri 39 buah, SLTP Swasta 32 buah, SMU Negeri 11 buah, SMU Swasta 8 buah, SM Kejuruan Negeri 3 buah, dan SM Kejuruan Swasta 20 buah.

b. Agama

Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2003 pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yaitu 93,56 persen, pemeluk agama Kristen 1,67 persen, pemeluk agama Katolik 4,61 persen, pemeluk agama Budha 0,15 persen dan pemeluk agama Hindu 0,00 persen.

4. Industri

Industri kayu, barang-barang dari kayu, bambu (tidak termasuk furniture), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu 43,72 persen, kemudian diikuti oleh industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia sebesar 34,22 persen.

Biaya input rata-rata yang diperlukan untuk bahan baku mencapai 72,35 persen, bahan bakar minyak dan pelicin 2,46 persen, bahan lain (di luar) bahan baku dan bahan penolong 15,26 persen, listrik yang dibeli 9,85 persen, dan sewa gudang dan alat 0,07 persen.

Selama kurun waktu 2000-2003 perkembangan potensi industri cukup mengesankan. Hal ini terlihat dari perkembangan komponen-komponennya yang meliputi : meningkatnya jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja yang diserap, nilai investasi yang masuk, nilai produksi yang dicapai, dan nilai tambah yang dihasilkan. Demikian juga untuk sentra industri selama dua tahun terakhir semua komponen berkembang cukup baik.

5. Keuangan dan Harga

Pada tahun anggaran 2003 realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp286,64 miliar. Sumber pendapatan

tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,25 miliar, Dana Perimbangan Rp241,45 miliar, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp26,94 miliar.

Selama tahun 2003, indeks harga sembilan bahan pokok di pasar Wates mengalami fluktuasi naik turun. Pergeseran indeks tersebut yaitu dari 340,87 pada awal tahun terus bergegas naik sampai bulan April, kemudian merosot terus hingga mencapai 335,36 pada bulan Agustus, sesudah itu naik terus hingga mencapai 351,53 pada akhir tahun 2003.

D. KABUPATEN GUNUNG KIDUL

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Gunung Kidul terletak antara $7^{\circ} 46'$ sampai $8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 21'$ sampai $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 - 700 meter di atas permukaan laut, yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Propinsi Jawa Tengah disebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Propinsi Jawa Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul tercatat 1.485,36 km² yang meliputi 18 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 108,39 km² atau sekitar 7,30 persen luas Kabupaten Gunung Kidul.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan hasil registrasi pertengahan tahun 2003 berjumlah 735.008 jiwa yang tersebar di 18 Kecamatan dan 144 Desa, dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Wonosari yaitu 78.464 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Kidul pada akhir tahun telah mencapai 754.047 jiwa.

3. Sosial

a. Pendidikan

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan masyarakat untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.

b. Agama

Ditinjau dari jumlah pemeluk agama, pada tahun 2003 di Kabupaten Gunung Kidul tercatat ada 716.783 umat Islam, 14.792 umat Kristen, 16.659 umat Katolik, 1.962 umat Hindu dan 443 umat Budha.

Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat di lihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan pada tahun 2003 tercatat untuk umat Islam sebanyak 2.382 unit, umat

Katolik sebanyak 79 unit, umat Kristen sebanyak 48 unit, umat Hindu sebanyak 13 unit, dan umat Budha sebanyak 6 unit.

4. Industri

Sektor industri dapat dibedakan atas Industri Besar, Sedang, Kecil dan Rumah tangga. Banyaknya industri pada tahun 2003 di Kabupaten Gunung Kidul untuk Industri Besar tercatat 3 perusahaan, Industri Sedang tercatat ada 6 perusahaan, Industri Kecil ada 5.571 perusahaan, dan Industri Rumah tangga ada 13.228 perusahaan. Secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 49.223 orang.

5. Keuangan

Pada tahun anggaran 2003 realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp322,98 miliar. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,48 miliar, dana perimbangan Rp293,11 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp12,39 miliar.

E. KOTA YOGYAKARTA

1. Keadaan Geografi

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ} 49' 26''$ sampai $07^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman,

Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 km² yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Desa/Kelurahan.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2003 tercatat 392.239 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,93 persen laki-laki dan 51,07 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

3. Sosial

a. Pendidikan

Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2003/2004 di Kota Yogyakarta terdapat 50 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 10 institut atau sekolah tinggi, dan 32 akademi. Jumlah dosen 5.074 orang yang terdiri dari 4.723 orang dosen yayasan dan 351 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 75.876 orang.

b. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 323.432 orang atau 82,46 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah

10,57 persen Katolik, 6,27 persen Kristen, 0,20 persen Hindu, dan 0,40 persen Budha.

4. Industri

Perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta pada tahun 2003 sebanyak 112 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 8.567 orang. Informasi mengenai industri kecil yang diperoleh dari Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta pada tahun 2003 jumlah industri kecil tercatat 5.785 unit dengan jumlah tenaga kerja 29.880 orang dan nilai investasi sebesar Rp146.188 juta.

5. Keuangan dan Perbankan

Pada tahun anggaran 2003 realisasi pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp349,4 miliar. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp68,622 miliar, pendapatan dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi Rp253,513 miliar, hibah Rp10,769 miliar dan penerimaan lainnya Rp16,496 miliar.

Sampai dengan bulan Desember 2003 posisi kredit perbankan di Kota Yogyakarta mencapai Rp497.768.000.000,00. Jumlah aktiva bank pada tahun 2003 adalah sebesar Rp7.722.047.000.000,00.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut pasal 79 Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber PAD meliputi :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dari pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam hal ini periode yang diteliti adalah sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003. Tahun 2000 dan tahun 2001 tidak dipakai dalam penelitian karena pada tahun 2000 hanya 9 bulan yaitu dimulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember sedangkan 3 bulan sebelumnya yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 maret tahun 2000 dimasukkan kedalam tahun anggaran 1999/2000. Untuk tahun 2001 tidak dipakai dalam penelitian karena tahun 2001 merupakan masa transisi pelaksanaan otonomi daerah.

A. Analisis Rasio Efektivitas.

Efektivitas (berhasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya penerimaan PAD digunakan asumsi sebagai berikut (Nadeak, 2003:56) :

1. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran (target PAD) maka dapat dikatakan penerimaan PAD semakin efektif.
2. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi PAD) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran (target PAD) maka dapat dikatakan penerimaan PAD kurang efektif.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Contoh perhitungan rasio efektivitas pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten Sleman :

$$\text{Rasio Efektivitas tahun anggaran 1998/1999} = \frac{\text{Rp14.786.415.038,00}}{\text{Rp14.414.507.991,00}} = 102,580 \%$$

Secara jelas rasio efektivitas penerimaan PAD ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel V.1
Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Sleman
Tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (A)	Target PAD (B)	Rasio Efektivitas (%) (A : B)
Sebelum Otonomi 1998/1999	Rp 14.786.415.038,00	Rp 14.414.507.991,00	102,580
1999/2000	17.125.444.712,22	16.790.232.506,42	101,996
Selama Otonomi 2002	38.908.192.767,97	34.846.979.981,95	111,654
2003	50.457.136.041,85	43.494.246.800,00	116,009

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

Tabel V.1 menunjukkan rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003 sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target PAD sudah mencapai lebih dari 100%. Rasio efektivitas di Kabupaten Sleman berkisar dari 101,996% sampai dengan 116,009%.

1. Sebelum Otonomi Daerah:

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas mencapai 102,580% berarti pada tahun anggaran tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 102,580% atau terdapat kelebihan target sebesar 2,580%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp14.414.507.991,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp14.786.415.038,00 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp371.907.040,00.
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 rasio efektivitas hanya mencapai 101,996% pada hal pada tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas mencapai 102,580% berarti ada penurunan sebesar 0,584%. Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan target penerimaan PAD untuk tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp16.790.232.506,42 dan dapat terealisasi sebesar Rp17.125.444.712,22 berarti terdapat kelebihan target sebesar Rp335.212.205,80. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1998/1999 terjadi penurunan PAD sebesar Rp36.694.834,20.

2. Selama Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun 2002 rasio efektivitas mencapai 111,655% berarti pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 111,655% atau terdapat kelebihan target sebesar 11,655%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 adalah sebesar Rp34.846.979.981,95 dan dapat terealisasi sebesar Rp38.908.192.767,97

yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp4.061.212.786,02. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1999/2000 berarti terjadi peningkatan penerimaan PAD sebesar Rp3.726.000.580,22. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

- b. Pada tahun 2003 rasio efektivitas penerimaan PAD mencapai 116,009% sedangkan pada tahun 2002 rasio efektivitas sebesar 111,655% berarti ada peningkatan sebesar 4,354%. Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp43.494.246.800,00 dan realisasinya mencapai Rp50.457.136.041,85 berarti ada kelebihan target sebesar Rp6.962.889.241,85. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002 berarti ada kenaikan pendapatan sebesar Rp5.901.676.455,83. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

Tabel V.2
Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Bantul
Tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (A)	Target PAD (B)	Rasio Efektivitas (%) (A : B)
Sebelum Otonomi			
1998/1999	Rp 6.555.905.231,89	Rp 5.953.852.229,23	110,112
1999/2000	8.011.806.408,58	6.611.375.363,96	121,182
Selama Otonomi			
2002	22.425.146.059,70	22.175.561.587,59	101,125
2003	32.882.358.490,40	31.364.543.187,76	104,839

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantul.

Tabel V.2 menunjukkan rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999,

tahun anggaran 1999/2000 dan selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003 sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target PAD sudah mencapai lebih dari 100%. Rasio efektivitas berkisar dari 101,125% sampai dengan 121,182%.

1. Sebelum Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas mencapai 110,112% berarti pada tahun tersebut pemungutan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 110,112% atau terdapat kelebihan target sebesar 10,112%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran tersebut adalah sebesar Rp5.953.852.229,23 dan dapat terealisasi sebesar Rp6.555.905.231,89 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp602.053.002,66.
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 rasio efektivitas mencapai 121,182% sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas sebesar 110,112% berarti ada peningkatan sebesar 11,07%. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp6.611.375.363,96 dan dapat terealisasi sebesar Rp8.011.806.408,58 berarti ada kelebihan target sebesar Rp1.400.431.044,62. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1998/1999 berarti terjadi kenaikan PAD sebesar Rp798.378.041,96. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

2. Selama Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun 2002 rasio efektivitas mencapai 101,125% berarti pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 101,125% atau terdapat kelebihan target sebesar 1,125%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 adalah sebesar Rp22.175.561.587,59 dan dapat terealisasi sebesar Rp22.425.146.059,70 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp249.584.472,11. Apabila dibandingkan dengan periode sebelum otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1999/2000 terjadi penurunan penerimaan PAD yang cukup besar yaitu sebesar 20,057% atau sebesar Rp1.150.846.572,51 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya mengalami penurunan.
- b. Pada tahun 2003 rasio efektivitas penerimaan PAD mencapai 104,839% sedangkan pada tahun 2002 rasio efektivitas penerimaan PAD sebesar 101,125% berarti ada peningkatan sebesar 3,714%. Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp31.364.543.187,76 dan realisasinya mencapai Rp 32.882.358.490,40 berarti ada kelebihan target sebesar Rp1.517.815.302,64. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002 berarti ada kenaikan pendapatan sebesar Rp1.268.230.830,53. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya semakin baik

Tabel V.3
Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Kulon Progo
Tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (A)	Target PAD (B)	Rasio Efektivitas (%) (A : B)
Sebelum Otonomi			
1998/1999	Rp 5.635.413.893,56	Rp 4.811.981.940,34	117,112
1999/2000	5.961.692.816,62	5.214.723.136,19	114,324
Selama Otonomi			
2002	16.225.501.698,51	13.168.930.591,00	123,210
2003	18.250.897.191,88	16.639.670.938,00	109,683

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo.

Tabel V.3 menunjukkan rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003 sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target PAD sudah mencapai lebih dari 100%. Rasio efektivitas berkisar dari 109,683% sampai dengan 123,210%.

1. Sebelum Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas mencapai 117,112% berarti pada tahun tersebut pemungutan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 117,112% atau terdapat kelebihan target sebesar 17,112%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran tersebut adalah sebesar Rp4.811.981.940,34 dan dapat terealisasi sebesar Rp5.635.413.893,56 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp823.431.953,22.
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 rasio efektivitas mencapai 114,324% sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas sebesar 117,112%, hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 2,788%.

Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp5.214.723.136,19 dan dapat terealisasi sebesar Rp5.961.692.816,62 berarti ada kelebihan target sebesar Rp746.969.680,43. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1998/1999 berarti terjadi penurunan jumlah PAD sebesar Rp76.462.272,79. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugasnya semakin menurun.

2. Selama Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun 2002 rasio efektivitas mencapai 123,210% berarti pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 123,210% atau terdapat kelebihan target sebesar 23,210%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 adalah sebesar Rp13.168.930.591,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp16.225.501.698,51 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp3.056.571.107,51. Apabila dibandingkan dengan periode sebelum dilaksanakan otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1999/2000 terjadi kenaikan penerimaan PAD yang cukup besar yaitu sebesar 8,886% atau sebesar Rp2.309.601.427,08 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugasnya semakin baik
- b. Pada tahun 2003 rasio efektivitas mencapai 109,683% sedangkan pada tahun 2002 rasio efektivitas sebesar 123,210% berarti ada penurunan pendapatan yang cukup besar yaitu sebesar 13,527%. Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp16.639.670.938,00 dan

dapat terealisasi sebesar Rp18.250.897.191,88 berarti ada kelebihan target sebesar Rp1.611.226.253,88. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002 berarti Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp1.445.344.853,63. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugasnya semakin menurun.

Tabel V.4
Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kabupaten Gunung Kidul
Tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (A)	Target PAD (B)	Rasio Efektivitas (%) (A : B)
Sebelum Otonomi			
1998/1999	Rp 4.473.470.121,35	Rp 4.074.414.903,99	109,794
1999/2000	5.409.513.658,45	4.855.665.263,81	111,406
Selama Otonomi			
2002	13.486.859.839,85	11.851.133.369,00	113,802
2003	17.481.692.174,84	15.823.807.519,00	110,477

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gunung Kidul.

Tabel V.4 menunjukkan rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003 sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target PAD sudah mencapai lebih dari 100%. Rasio efektivitas berkisar dari 109,794% sampai dengan 113,802%.

1. Sebelum Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas mencapai 109,794% berarti pada tahun tersebut pemungutan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 109,794% atau terdapat kelebihan target sebesar 9,794%. Target

Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran tersebut adalah sebesar Rp4.074.414.903,99 dan dapat terealisasi sebesar Rp4.473.470.121,35 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp399.055.217,36.

- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 rasio efektivitas mencapai 111,406% sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas sebesar 109,794%, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan sebesar 1.612%. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp4.855.665.263,81 dan dapat terealisasi sebesar Rp5.409.513.658,45 berarti ada kelebihan target sebesar Rp553.848.394,64. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1998/1999 berarti terjadi kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp154.793.177,28. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

2. Selama Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun 2002 rasio efektivitas mencapai 113,802% berarti pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 113,802% atau terdapat kelebihan target sebesar 13,802%, sedangkan pada periode sebelum dilaksanakan otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1999/2000 rasio efektivitas mencapai 111,406% berarti penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 2,396%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 adalah sebesar Rp11.851.133.369,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp13.486.859.839,85

yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp1.635.726.470,85. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1999/2000 terjadi kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.081.878.076,21. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

- b. Pada tahun 2003 rasio efektivitas mencapai 110,477% sedangkan pada tahun 2002 rasio efektivitas sebesar 113,802% berarti ada penurunan pendapatan sebesar 3,325%. Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp15.823.807.519,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp17.481.692.174,84 berarti ada kelebihan target sebesar Rp1.657.884.655,84.

Tabel V.5
Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kota Yogyakarta
Tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, dan 2003.

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (A)	Target PAD (B)	Rasio Efektivitas (%) (A : B)
Sebelum Otonomi			
1998/1999	Rp 19.972.895.793,60	Rp 18.931.756.418,35	105,499
1999/2000	24.790.128.183,92	23.349.603.553,91	106,169
Selama Otonomi			
2002	56.377.459.398,89	49.600.293.410,17	113,664
2003	68.621.564.311,07	56.822.010.000,00	120,766

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta.

Tabel V.5 menunjukkan rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003 sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target PAD sudah



mencapai lebih dari 100%. Rasio efektivitas berkisar dari 105,499% sampai dengan 120,766%.

1. Sebelum Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas mencapai 105,499% berarti pada tahun tersebut pemungutan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 105,499% atau terdapat kelebihan target sebesar 5,499%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran tersebut adalah sebesar Rp18.931.756.418,35 dan dapat terealisasi sebesar Rp19.972.895.793,60 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp1.041.139.375,25
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 rasio efektivitas mencapai 106,169% sedangkan pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efektivitas sebesar 105,499% berarti ada peningkatan sebesar 0,670%. Pada tahun anggaran ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp23.349.603.553,91 dan dapat terealisasi sebesar Rp24.790.128.183,92 berarti ada kelebihan target sebesar Rp1.440.524.630,01. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 1998/1999 berarti terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp399.385.254,76. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

2. Selama Otonomi Daerah :

- a. Pada tahun 2002 rasio efektivitas mencapai 113,664% berarti pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target sebesar 113,664% atau terdapat kelebihan target sebesar

13,664%. Sedangkan pada periode sebelum dilaksanakan otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1999/2000 rasio efektivitasnya mencapai 106,169% berarti ada peningkatan sebesar 7,195%. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 adalah sebesar Rp49.600.293.410,17 dan dapat terealisasi sebesar Rp56.377.459.398,89 yang berarti terdapat kelebihan target PAD sebesar Rp6.704.830.988,72. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 1999/2000 berarti ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.264.306.358,71. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

- b. Pada tahun 2003 rasio efektivitas penerimaan PAD mencapai 120,766% sedangkan pada tahun 2002 rasio efektivitas penerimaan PAD sebesar 113,664% berarti ada peningkatan sebesar 7,102%. Pada tahun ini Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp56.822.010.000,00 dan realisasinya mencapai Rp68.621.564.311,07 berarti ada kelebihan target sebesar Rp11.799.554.311,07. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002 berarti ada kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.094.723.322,35. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya semakin baik.

B. Perbandingan Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mengetahui perbandingan rasio efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dapat di lihat di tabel berikut ini :

Tabel V.6
Perbandingan rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran	Rasio Efektivitas				
	Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunung Kidul	Kota Yogyakarta
Sebelum Otonomi					
1998/1999	102,580 %	110,112 %	117,112 %	109,794 %	105,499 %
1999/2000	101,996 %	121,182 %	114,324 %	111,406 %	106,169 %
Selama Otonomi					
2002	111,654 %	101,125 %	123,210 %	113,802 %	113,664 %
2003	116,009 %	104,839%	109,683 %	110,477 %	120,766 %

Tabel V.6 menunjukkan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar dari 101,996% sampai dengan 123,210%. Berarti kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sudah efektif karena rasio efektivitasnya sudah mencapai lebih dari 100%.

Pada tahun anggaran 1998/1999 berdasarkan tabel perbandingan rasio efektivitas di atas dapat di lihat bahwa daerah yang memiliki rasio efektivitas paling tinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 117,112%. Pada tahun anggaran 1999/2000 tingkat rasio efektivitas yang paling tinggi terdapat di Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu sebesar 121,183%. Pada tahun 2002 tingkat rasio efektivitas yang paling tinggi terdapat di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 123,210%. Dan pada tahun 2003 tingkat rasio efektivitas paling tinggi terdapat di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Apabila dilakukan perbandingan secara keseluruhan dari periode sebelum otonomi daerah yaitu tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan periode selama otonomi daerah yaitu tahun 2002, tahun 2003 tingkat rasio efektivitas yang mengalami kenaikan secara terus menerus terdapat pada

Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya semakin baik atau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta di tinjau dari tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama otonomi daerah sudah berjalan efektif, karena kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila tingkat efektivitas yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (Halim, 2004:264). Tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman berkisar dari 101,996% sampai dengan 116,009%, Pemerintah Kabupaten Bantul berkisar dari 101,125% sampai dengan 121,182%, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkisar dari 109,683% sampai dengan 123,210%, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berkisar dari 109,794% sampai dengan 113,802% dan Pemerintah Kota Yogyakarta berkisar dari 105,499% sampai dengan 120,766%.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sudah efektif karena rasio efektivitasnya sudah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun anggaran 1998/1999 kinerja Pemerintah Daerah yang paling efektif terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat efektivitas sebesar 117,112%, tahun anggaran 1999/2000 terdapat pada

Pemerintah Kabupaten Bantul dengan tingkat efektivitas sebesar 121,182%, tahun 2002 terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat efektivitas sebesar 123,210% dan tahun 2003 terdapat pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tingkat efektivitas sebesar 120,766%. Daerah yang mengalami kenaikan tingkat rasio Efektivitas dari tahun ke tahun terdapat pada Pemerintah Kota Yogyakarta, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta semakin baik atau selalu mengalami peningkatan.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta penulis hanya mengambil data untuk periode sebelum otonomi daerah tahun anggaran 1998/1999, tahun anggaran 1999/2000 dan untuk periode selama otonomi daerah tahun 2002, tahun 2003.

Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat efektivitas sehingga penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Halim (2004:285) yang mengatakan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian selama 3 bulan di Pemerintah Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah maupun bagi peneliti selanjutnya. Masukan dan saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang selalu mengalami peningkatan dari periode sebelum dan selama otonomi daerah, khususnya untuk Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya tetap dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pemungutan PAD yang masih rendah penerimaannya.
2. Efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 1999/2000 yang mengalami penurunan terdapat di Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu sebesar 0,584 dan terdapat di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 2,788%. Untuk tahun 2002 yang mengalami penurunan terdapat di Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu sebesar 20,057%. Untuk tahun 2003 yang mengalami penurunan terdapat di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 13,527% dan terdapat di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 3,355%. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Secara ekstensifikasi, yaitu pemerintah daerah seharusnya dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Secara intensifikasi yaitu dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak (Halim, 2002:32).

3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama dan sampel yang digunakan dalam penelitian tidak hanya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di satu Propinsi saja melainkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di beberapa Propinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul. 2003. *Kabupaten Bantul dalam Angka*.
- _____, Kabupaten Gunung Kidul. 2003. *Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka*.
- _____, Kabupaten Kulon Progo. 2003. *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka*.
- _____, Kabupaten Sleman. 2003. *Kabupaten Sleman dalam Angka*.
- _____, Kota Yogyakarta. 2003. *Kota Yogyakarta dalam Angka*.
- _____, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2003. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE-UGM.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2004. Edisi Revisi. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nadeak, Ruslina. 2003. *Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Sanata Dharma.
- Pedoman Penulisan Skripsi*. 2004. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

_____, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

_____, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

_____, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

_____, *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Triyono. 2002. *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 1 No.2 September 2002.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	7.667.861.469,50	7.229.182.708,87	(438.678.760,63)
Pos Retribusi Daerah	3.407.050.940,00	3.466.829.646,00	59.778.706,00
Pos Bagian Laba BUMD	880.999.000,00	883.219.551,51	2.220.551,51
Pos Penerimaan Dari Dinas-Dinas	2.036.323.581,50	2.136.076.766,55	99.753.185,05
Pos Penerimaan Lain-Lain	422.273.000,00	1.071.106.365,07	648.833.365,07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	14.414.507.991,00	14.786.415.038,00	371.907.047,00

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	8.811.633.333,09	9.185.908.717,58	374.275.384,49
Pos Retribusi Daerah	5.357.701.800,00	5.551.344.263,90	193.642.463,90
Pos Bagian Laba Usaha Daerah	1.073.790.632,33	728.790.632,33	(345.000.000,00)
Pos Penerimaan Lain-Lain	1.547.106.741,00	1.659.401.098,41	112.294.357,41
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	16.790.232.506,42	17.125.444.712,22	335.212.205,80

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2002

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	18.399.254.338,95	22.094.977.769,96	3.695.723.431,01
Retribusi Daerah	10.180.264.300,00	10.225.900.071,44	45.635.771,44
Bagian Laba Perusahaan Daerah	1.979.360.635,00	1.971.054.416,32	(8.306.218,68)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.288.100.708,00	4.616.260.510,25	328.159.802,25
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	34.846.979.981,95	38.908.192.767,97	4.061.212.786,02

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2003

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	19.300.000.000,00	24.907.210.488,00	5.607.210.488,00
Retribusi Daerah	13.173.361.000,00	14.297.430.051,75	1.124.069.051,75
Bagian Laba Perusahaan Daerah	2.502.558.000,00	2.310.617.215,60	(191.940.784,40)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	8.518.327.800,00	8.941.878.286,50	423.550.486,50
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	43.494.246.800,00	50.457.136.041,85	6.962.889.241,85

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman.

Lampiran 2

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	1.422.686.586,00	1.571.946.970,00	149.260.384,00
Pos Retribusi Daerah	3.490.689.904,00	3.387.967.430,00	(102.722.474,00)
Pos Bagian Laba BUMD	377.084.739,23	368.314.196,62	(8.770.542,61)
Pos Penerimaan Dari Dinas-Dinas	300.200.000,00	265.329.358,00	(34.870.642,00)
Pos Penerimaan Lain-Lain	363.191.000,00	962.347.277,27	599.156.277,27
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.953.852.229,23	6.555.905.231,89	602.053.002,66

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantul.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	1.706.300.000,00	1.839.648.696,59	133.348.696,59
Pos Retribusi Daerah	4.096.870.240,00	4.910.777.928,00	813.907.688,00
Pos Bagian Laba BUMD	584.785.979,96	584.786.411,00	431,04
Pos Penerimaan Lain-Lain	223.419.144,00	676.593.372,99	453.174.228,99
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.611.375.363,96	8.011.806.408,58	1.400.431.044,62

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantul.

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2002

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	4.803.611.193,00	4.888.906.506,00	85.295.313,00
Retribusi Daerah	12.538.449.170,00	12.162.662.721,00	(375.786.449,00)
Bagi Hasil Laba Usaha Daerah	3.054.231.405,59	3.054.231.742,59	337,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.779.269.819,00	2.319.345.090,11	540.075.271,11
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	22.175.561.587,59	22.425.146.059,70	249.584.472,11

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantul.

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2003

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	6.437.296.400,00	6.600.583.490,40	163.287.394,00
Retribusi Daerah	17.937.662.280,00	18.489.365.638,00	551.703.358,00
Bagian Laba Usaha Daerah	3.425.000.000,00	3.467.226.010,72	42.226.010,72
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.564.584.507,76	4.325.183.047,98	760.598.539,92
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	31.364.543.187,76	32.882.358.490,40	1.517.815.302,64

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bantul.

Lampiran 3

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	530.167.000,00	557.620.321,50	27.453.321,50
Pos Retribusi Daerah	3.310.429.000,00	3.854.414.159,00	543.985.159,00
Pos Bagian Laba BUMD	246.197.048,41	253.882.676,13	7.685.627,72
Pos Penerimaan Dari Dinas-Dinas	374.000.000,00	384.820.910,00	10.820.910,00
Pos Penerimaan Lain-Lain	351.188.891,93	584.675.826,93	233.486.935,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.811.981.940,34	5.635.413.893,56	823.431.953,22

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo.

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	591.000.000,00	618.088.508,41	27.088.508,41
Pos Retribusi Daerah	4.041.364.900,00	4.429.151.551,50	387.786.651,50
Pos Bagian Laba BUMD	354.253.336,19	357.202.144,05	2.948.807,86
Pos Penerimaan Lain-Lain	228.104.900,00	557.250.612,66	329.145.712,66
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5.214.723.136,19	5.961.692.816,62	746.969.680,43

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2002**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	1.261.038.916,00	1.396.710.526,00	135.671.610,00
Retribusi Daerah	6.793.173.225,00	7.778.217.163,50	985.043.938,50
Laba Usaha Daerah	782.400.000,00	778.176.101,91	(4.223.898,09)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.332.318.450,00	6.272.397.907,10	1.940.079.457,10
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	13.168.930.591,00	16.225.501.698,51	3.056.571.107,51

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2003**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	1.674.824.600,00	2.067.035.684,83	392.211.084,83
Retribusi Daerah	8.245.355.100,00	9.247.556.960,00	1.002.201.860,00
Bagian Laba Usaha Daerah	1.118.970.357,00	1.066.666.965,17	52.303.391,83
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.600.520.881,00	5.869.637.581,88	269.116.700,88
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	16.639.670.938,00	18.250.897.191,88	1.611.226.253,88

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kulon Progo.

Lampiran 4

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	713.745.375,00	807.150.110,45	93.404.735.45
Pos Retribusi Daerah	2.828.549.190,00	2.650.511.499,70	(178.037.690.30)
Pos Bagian Laba BUMD	196.535.343,79	202.570.703,79	6.035.360.00
Pos Penerimaan Dari Dinas-Dinas	192.285.000,00	255.207.850,00	62.922.850.00
Pos Penerimaan Lain-Lain	143.292.995,20	558.029.957,41	414.729.962.41
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.074.414.903,99	4.473.470.121,35	399.055.217.36

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gunung Kidul.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	909.400.000,00	982.690.105,95	73.290.105,95
Pos Retribusi Daerah	3.487.502.360,00	3.571.247.169,00	83.744.809,00
Pos Bagian Laba Usaha Daerah	295.023.903,81	256.974.541,81	(38.049.362,00)
Pos Lain-Lain Pendapatan	163.739.000,00	598.601.841,69	434.862.841,69
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.855.665.263,81	5.409.513.658,45	553.848.394,64

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gunung Kidul.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN 2002**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	1.559.658.159,00	1.892.344.797,92	332.686.638,92
Retribusi Daerah	8.898.690.350,00	9.009.394.578,75	110.704.228,75
Bagian Laba Usaha Daerah	571.134.860,00	551.511.456,67	(19.623.403,33)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	821.650.000,00	2.033.609.006,51	1.211.959.006,51
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	11.851.133.369,00	13.486.859.839,85	1.635.726.470,85

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gunung Kidul.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN 2003**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	1.922.408.159,00	3.023.328.424,00	1.100.920.265,00
Retribusi Daerah	10.732.109.360,00	9.906.187.522,00	(825.921.838,00)
Bagian Laba Usaha Daerah	848.750.000,00	875.201.686,12	26.451.686,12
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.320.540.000,00	3.676.974.542,72	1.356.434.542,72
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	15.823.807.519,00	17.481.692.174,84	1.657.884.655,84

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gunung Kidul.

Lampiran 5

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	9.309.972.321,25	10.266.547.924,25	956.575.603,00
Pos Retribusi Daerah	7.185.230.429,00	7.157.371.159,00	(27.859.270,00)
Pos Bagian Laba BUMD	875.479.894,36	879.374.865,76	3.894.971,40
Pos Penerimaan Dari Dinas-Dinas	469.398.432,00	467.991.021,83	(1.407.410,17)
Pos Penerimaan Lain-Lain	1.091.675.341,74	1.201.610.822,76	109.935.481,02
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	18.931.756.418,35	19.972.895.793,60	1.041.139.375,25

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta.

DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pos Pajak Daerah	12.111.987.785,00	13.688.831.229,00	1.576.843.444,00
Pos Retribusi Daerah	8.137.820.480,00	7.978.502.606,53	(159.317.873,47)
Pos Bagian Laba BUMD	1.461.628.050,00	1.116.628.134,71	(344.999.915,29)
Pos Penerimaan Lain-Lain	1.638.167.238,91	2.006.166.213,68	367.998.974,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	23.349.603.553,91	24.790.128.183,92	1.440.524.630,01

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2002**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	27.107.396.233,00	30.517.591.845,50	3.410.195.612,50
Retribusi Daerah	13.991.791.110,00	14.193.457.159,11	201.666.049,11
Bagian Laba BUMD	2.509.234.852,65	2.509.234.852,65	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.991.871.214,52	9.157.175.541,63	3.092.969.327,11
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	49.600.293.410,17	56.377.459.398,89	6.704.830.988,72

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta.

**DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2003**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang) Dari Anggaran
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pajak Daerah	32.068.358.000,00	33.526.514.267,53	1.458.156.267,53
Retribusi Daerah	15.718.585.000,00	16.093.220.398,00	374.635.398,50
Hasil Perusahaan Milik Daerah	2.509.235.000,00	4.081.649.388,86	1.572.414.388,86
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.525.832.000,00	14.920.180.256,18	8.394.348.256,18
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	56.822.010.000,00	68.621.564.311,07	11.799.554.311,07

Sumber Data : Data diolah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2636

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi - USD No : 31/Kaprodi Akt/249/V/2005
Tanggal : 6 Mei 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : **HERU BUDI SULISTYO** No. MHSW : 00 2114 134

Alamat Instansi : Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta

Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Lokasi : Propinsi DIY

Waktunya : Mulai tanggal 9 Mei 2005 s/d 9 Agustus 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpariangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

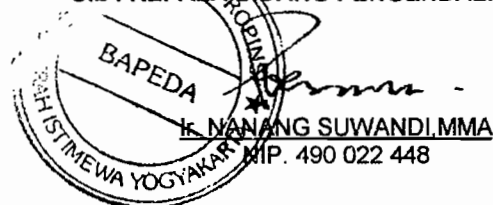
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Bupati Sleman dan Kulon Progo c.q. Ka. Bappeda;
4. Bupati Bantul dan Gunung Kidul c.q. Ka. Bappeda;
5. Ka. BPKD Prop. DIY;
6. Dekan Fak. Ekonomi - USD;
7. Peninggal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 9 Mei 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasanya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IJIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 010 / 2005.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/2636 Tanggal: 09 Mei 2005 Hal : Ijin Penelitian

MENGIJINKAN :

Kepada :
Nama : HERU BUDI SULISTYO
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 002114134
Program/ tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : U S D Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta
Alamat Rumah : Sembung, Purwobinangun, Pakem
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA
OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta)**
Lokasi : Bappeda Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 09 Mei 2005 s.d
09 Agustus 2005.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepa'a instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Ijin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

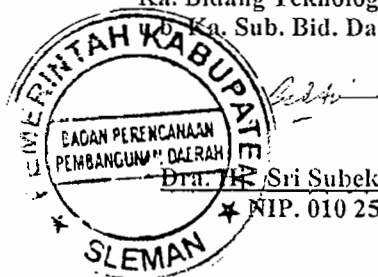
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 12 Mei 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Sekretariat Bappeda Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
5. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
Ka. Sub. Bid. Data & Informasi



Sri Subekti Handayani
NIP. 010 253 131



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 523

Membaca Surat : Ka Bappeda Prop.DIY. Nomor : 070/2656 Tanggal : 9 Mei 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : HENU BUDI SULISTYO No.MHSW : 002114134 MHSW : UBD YK.

Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktu : Mulai pada tanggal : 9 Mei 2005 s/d 9 Agustus 2005

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (dinas/instansi/camat/lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 16 Mei 2005

Tembusan dikirim kepada yth. :

1. Bpk. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbang Linmas Kab. Bantul
3. Kepala Bagian Keuangan Kab. Bantul
4. Ka. BPS Kab. Bantul
5. Yang Beresangkutan
6. Bertinggal



a.n. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kab. Bantul
Sub. Sekretaris,

SULICHO
NIP. 197101162494



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jln. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw : 225

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2/ 224 / V /2005

Dasar : Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi DIY Nomor 07.0/2636 tanggal 9 Mei 2005.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 675 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Diizinkan kepada : HERU BUDI SULISTYO No. Mhs. : 002114134

PT/Instansi : Fak Ekonomi - USD

Keperluan : Ijin Penelitian.

Judul : ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta)

Lokasi : Kabupaten Kulon Progo.

Waktu : s/d 9 Agustus 2005.

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat /Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantunya seperlunya.

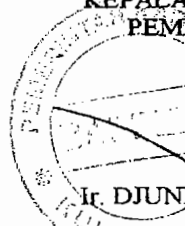
Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 19-Mei-2005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati (sebagai laporan).
2. Ka. Kantor Kesbang & Linmas Kab. KP;
3. Ka. BPS Kab. Kulon Progo;
4. Ka. BPKD Kab. Kulon Progo;
5. Arsip.

An. BUPATI KULON PROGO
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kabid. Litbangdal



Ir. DJUNJANTO MARSUDI UTOMO
NIP. 730006206

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 396
Ka. BAPPEDA Prop. DIY No.07.0/ 2636 Tanggal 9 Mei 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Membaca Surat :
Mengingat : 1. Keputusan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tentang : Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;
2. Keputusan Mendagri Nomor 61 Tahun 1983 tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Depdagri ;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Istansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Diizinkan kepada :
Nama : HERU BUDI SULISTYO No. Nhs. : 002114134
Fak/Akademi : Ekonomi / Universitas Snata Dharma Yogyakarta
Alamat Instansi : Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta
Alamat Rumah : Sembung, Purwobinangun, Pakem, Sleman
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA
OTONOMI DAERAH

Lokasi : Badan Keuangan Daerah Kab. Gunungkidul

Dosen/Pembimbing : 1. Firma Sulistiyowati, SE., M Si
2. Drs. Kuntoro H. Akt

Waktunya : Mulai pada tanggal 25 Mei s.d 25 Agustus 2005
Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Gunungkidul).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat suka memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 25 Mei 2005

An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
UB. KABID. PENDATAAN DAN PELAPORAN



- Tembusan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Gunungkidul (sebagai Laporan)
 2. Sdr. Kakan Kesbanglinmas Kab. Gunungkidul.
 3. Sdr. Ka. Bakuda. Kab. Gk
 4. Sdr. Ka. Bag Keuangan Setda Kab. Gk
 5. Sdr. Dekan Fak. Ekonomi- USD Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554431

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1048

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2636 Tanggal : 09/05/2005

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta



Dijijinkan Kepada Nama : Heru Budi Sulistyo NO MHS / NIM : 002114134

Pekerjaan : Mahasiswa FE-USD Yogyakarta

Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta

Penanggungjawab : Drs. Kuntoro M.Skt

Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 09/05/2005 Sampai 09/08/2005

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pernegang Izin

Heru Budi Sulistyo

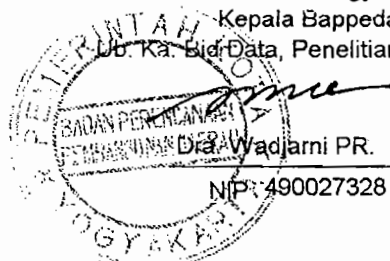
Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Ka. BPKD Kota Yogyakarta
5. Arsip.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada Tanggal : 18/05/2005

A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda
 (D. Ka. Bid. Data, Penelitian & KAI)



Dra. Wadjarni PR.

NIP. 490027328